

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan dari tesis ini. Di dalam bab ini akan dibahas hal-hal mendasar dari tesis ini. Hal-hal mendasar tersebut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, tinjauan pustaka, kebaruan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini masih banyak terjadi krisis kemanusiaan yang sangat menyedihkan seperti di Timur Tengah ada krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman dan Suriah yang diakibatkan oleh perang saudara. Selain itu, di Asia Tenggara yang letak geografisnya lebih dekat dengan Indonesia pun juga telah terjadi krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut terjadi di Myanmar yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara maupun oleh etnis-etnis lainnya yang ada di negara itu kepada etnis Rohingya.

Krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya dikenal dengan Tragedi Rahkhine yang terjadi pada tahun 2012 yang kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tragedi ini telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan oleh massa yang sedang emosi, marah dan kalap. Tentu saja yang banyak menjadi korban dan target dari tragedi kekerasan ini adalah kelompok minoritas Muslim Rohingya. (Qurtuby, 2017)

Dalam insiden kekerasan ini, pemerintah Myanmar tidak menyelesaikan atau mencari solusi atas konflik ini, namun malah memperburuk keadaan. Seperti adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya yaitu dengan menolak memberikan status warga negara kepada etnis Rohingya (Kompas.com, 2013). Selain itu, operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar karena insiden pembunuhan sembilan prajurit penjaga perbatasan pada 9 Oktober 2016 juga mengakibatkan 100 orang tewas, ratusan ditahan di penjara militer, 1.200 bangunan rata dengan tanah, belasan perempuan diperkosa oleh militer Myanmar, dan 150.000 pengungsi dibiarkan tanpa makanan dan obat-obatan (Gunawan, 2016).

Adanya krisis kemanusiaan di Myanmar tersebut menyebabkan dua negara mayoritas Islam di Asia Tenggara yaitu Malaysia dan Indonesia ikut terlibat untuk meredakan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya yang kebetulan mayoritas agamanya juga Muslim. Malaysia yang memiliki penduduk mayoritas Islam pun juga tidak tinggal diam atas kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya tersebut. Malaysia menggelar pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 21 Januari 2017 di Kuala Lumpur untuk membahas isu Rohingya di Rakhine State. Perdana Menteri Malaysia saat itu Najib Razak mendesak 57 negara Muslim anggota OKI bertindak untuk mengakhiri sesuatu yang Najib sebut sebagai tragedi kemanusiaan dan ia menyeru Myanmar untuk berhenti menyerang dan mendiskriminasi minoritas Rohingya (Puspaningtyas, 2019).

Tindakan Malaysia tersebut mendapat kecaman dari Myanmar. Myanmar mencela Malaysia dengan menyebut bahwa upaya Malaysia

adalah untuk menekan negara lain demi kepentingan politik. Dikutip dari *Global New Light of Myanmar*, kantor Kementerian Luar Negeri Myanmar menyalahkan Malaysia dan Myanmar menuduh Kuala Lumpur mengeksploitasi krisis untuk agenda politik dan menilai Malaysia telah merusak upaya pemerintah Myanmar untuk mengatasi masalah (Puspaningtyas, 2019).

Selain itu adanya krisis di Myanmar juga membuat LSM Malaysia ingin memberikan sejumlah bantuan ke daerah yang dilanda konflik di Myanmar. Meskipun demikian, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa mereka telah meminta Malaysia untuk menghentikan bantuan makanan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM ke komunitas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dilaporkan *Kyodo News*, telah mengajukan permintaan melalui kedutaan besar Malaysia di negara tersebut (Muhaimin, 2017).

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia pun juga merespon konflik etnis di Myanmar tersebut. Namun berbeda dengan Malaysia yang dikecam oleh Myanmar bahkan sebagian bantuannya pun tidak boleh masuk ke Myanmar, Indonesia disambut baik oleh pemerintah Myanmar dan bahkan bantuan-bantuan Indonesia dengan lancar memasuki Myanmar. Hal ini membuat Indonesia dipuji oleh dunia internasional karena peran pentingnya dalam krisis kemanusiaan di Myanmar ini.

Hal ini dapat dilihat ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan bertemu pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi di Naypyidaw pada 4 September 2017. Pada pertemuan itu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi

meminta seluruh pihak di Myanmar menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan situasi di Rakhine. Dalam pertemuan itu, Retno mengatakan, Indonesia juga mengusulkan empat formula lain untuk merespons konflik berkepanjangan di Rakhine seperti Indonesia mendorong Myanmar untuk segera memulihkan stabilitas dan keamanan di Rakhine, meminta otoritas Myanmar melindungi seluruh warganya tanpa memandang ras dan agama, dan juga meminta Myanmar membuka akses kemanusiaan ke Rakhine bagi sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk Indonesia dan ASEAN (Suastha, 2017b). Terakhir, Indonesia juga meminta Myanmar segera melaksanakan seluruh rekomendasi Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Rakhine, Kofi Annan, yang telah dikeluarkan sekitar Maret lalu. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Penasihat Negara Suu Kyi menyambut positif usulan-usulan Indonesia tersebut dan Myanmar juga mengatakan usulan Indonesia ini sejalan dengan upaya pemerintahnya selama ini dalam menangani situasi di Rakhine (Suastha, 2017b).

Selain dengan Suu Kyi, Retno juga sempat bertemu dengan panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing dan dua pejabat tinggi lainnya, yakni penasihat keamanan nasional dan menteri muda urusan luar negeri Myanmar. Dalam pertemuan itu Indonesia juga turut menyampaikan pesan dan kekhawatiran dunia internasional mengenai krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine dan penasihat keamanan Myanmar menyampaikan pihaknya terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. (Suastha, 2017b)

Selain itu pada 21 September 2017 bantuan Indonesia dengan lancar memasuki Myanmar. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia, Dr. Ito Sumardi pada 21 September 2017 menyerahkan 20 ton bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Rakhine State yang tersebar di beberapa daerah dan bantuan tersebut diapresiasi oleh pemerintah Myanmar. Adapun bantuan dari Indonesia ini merupakan bantuan dalam bentuk barang pertama yang diterima oleh pemerintah Myanmar dengan menggunakan mekanisme G to G sesuai kebijakan Myanmar terkait penyaluran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di negara bagian Rakhine. (Islam, 2017)

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, muncul rumusan masalah yaitu mengapa diplomasi kemanusiaan Indonesia terkait krisis kemanusiaan Rohingya lebih disambut baik oleh Myanmar dibandingkan dengan diplomasi kemanusiaan Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengangkat tesis ini adalah :

1. Membandingkan diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Malaysia dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya sehingga terkuak mengapa usulan-usulan dan bantuan-bantuan dari Indonesia untuk krisis Rohingya disambut baik oleh pemerintah Myanmar dari pada Malaysia
2. Penulisan ini juga ditujukan untuk melengkapi tugas akhir penulis yang merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar magister

strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.4. Kontribusi Penelitian

Tesis ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Menyajikan data ilmiah terkait perbandingan diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Malaysia dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya.
2. Memunculkan pemahaman baru terkait dengan strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Ada banyak artikel meskipun terpisah yang membahas strategi Indonesia dan Malaysia terkait dengan krisis kemanusiaan etnis Rohingya yang layak dijadikan literature review. Di dalam artikel-artikel tersebut banyak membahas tentang strategi atau tindakan baik yang dilakukan oleh Indonesia maupun Malaysia dalam mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Namun demikian, belum ada artikel yang membahas tentang perbandingan antara diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya.

Artikel dengan judul *Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017* membahas strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus krisis kemanusiaan Rohingya. Strategi tersebut adalah melakukan pendekatan diplomasi

antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Myanmar dan berkolaborasi dengan PBB sebagai struktur internasional serta melibatkan pihak sipil untuk menyalurkan bantuan kepada etnis Rohingya di Myanmar (Kusuma & Sitorus, 2019). Sedangkan di dalam artikel yang berjudul *Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Di Bawah Prinsip Non-intervensi Asean* menyatakan bahwa Diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar dilakukan melalui multitrack diplomacy yang dilaksanakan dengan tiga cara (Ikhsani, 2019). Yang *pertama* diplomasi kemanusiaan dengan pendekatan konstruktif melalui *Soft Power*. Yang *kedua* diplomasi kemanusiaan melalui pembangunan kapasitas seperti pembangunan kapasitas kepolisian dan demokratisasi. Dan yang *terakhir* Diplomasi Kemanusiaan Melalui Upaya Rekonsiliasi seperti melakukan pembangunan yang inklusif, mengadakan dialog lintas agama dan mengupayakan repatriasi. Selain itu, di dalam artikel yang berjudul *Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017* mengulas langkah diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya Tahun 2017. Diplomasi kemanusiaan Indonesia tersebut meliputi; melakukan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh serta beberapa pihak asing, serta sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional (Hadi, Meisita, & Susilo, 2017).

Artikel lainnya seperti artikel yang berjudul *Indonesia's Role towards Myanmar in Assisting to Resolve the Humanitarian Crisis in Rohingya (2014-2018)* menemukan bahwa ada beberapa peran Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya (Purnama, Dermawan, & Akmaluddin, 2019). Peran tersebut yaitu

sebagai *Regional Leader* di ASEAN dengan menjadikan isu Rohingya sebagai kepedulian kemanusiaan bersama dalam berbagai pertemuan di ASEAN. Kemudian Indonesia juga menjadi teman setia Myanmar dengan menawarkan bantuan sebagai mediator dalam membuka dialog bagi aktor lain untuk mendukung penyelesaian konflik Rohingya. Indonesia juga berperan sebagai *Mediator-Integrator* yang intensif berkomunikasi dengan Myanmar dan membuka komunikasi dengan berbagai aktor internasional baik negara maupun organisasi internasional. Selain itu, Indonesia juga melakukan peran bebas aktif yang bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya tanpa tekanan dari pihak luar dalam kasus krisis kemanusiaan Myanmar. Adapun artikel yang berjudul *The Strategy of Indonesian Diplomacy Efforts and National Political Interests in the Ethnic Rohingya Refugee Conflict* menemukan bahwa pemerintah Indonesia terkait krisis kemanusiaan etnis Rohingya menggunakan strategi diplomasi kemanusiaan sebagai jembatan penyelesaian kasus etnis Rohingya di Myanmar dan memiliki kepentingan nasional pada aspek keamanan dan politik, bukan hanya soal moralitas (Suwandari & Sugito, 2021).

Sedangkan di dalam artikel yang berjudul *Upaya Diplomatik Malaysia Terhadap Myanmar Dalam Menangani Pembantaian Etnis Muslim Rohingya (2015-2017)* bercerita tentang upaya Malaysia dalam menangani pembantaian etnis muslim Rohingya. Di dalam artikel tersebut diceritakan bahwa proses diplomasi yang dilakukan Malaysia untuk membantu etnis Muslim Rohingya adalah dengan mengajak beberapa negara ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk merundingkan masalah Rohingya di dalam forum Organisasi ASEAN dan mencari solusi terbaik untuk membantu etnis Muslim Rohingya

(Yunita, 2019). Sedangkan artikel yang berjudul *Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar* selain mengulas sikap non-intervensi yang dijalankan ASEAN dalam menanggapi krisis Rohingya di Myanmar juga disinggung sikap Malaysia dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar (Indra, 2018). Sikap Malaysia tersebut yaitu dengan mengirim secara langsung menteri luar negerinya, Anifah Aman ke Yangon untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi untuk membicarakan perkembangan terkini persekusi etnis Rohingya. Namun, hingga akhir tahun 2015 belum begitu jelas sikap pemerintah Myanmar atas kritik dari pemerintah Malaysia dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Artikel lainnya terkait strategi Malaysia atas krisis kemanusiaan Rohingya juga terlihat pada artikel yang berjudul *Changes In Malaysia's Behaviour of ASEAN Non Intervention Principle In The Rohingya Case*. Artikel tersebut menyebutkan bahwa Malaysia dalam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya melakukan beberapa upaya (Ekklesia & Fitriani, 2018). Upaya tersebut yaitu dengan menerima pengungsi Rohingya yang tiap tahunnya datang ke Malaysia. Selain itu, Malaysia juga banyak mengkritik Myanmar atas kebijakan pemerintah dan tindakan militer Myanmar yang melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada etnis minoritas Rohingya. Malaysia di bawah pemerintahan perdana Menteri Najib Razah juga meminta OKI (Organisasi Konferensi Islam) untuk mendesak Myanmar terkait kasus Rohingya. Dan juga Pemerintah Malaysia mengirimkan bantuan ke Myanmar yaitu mengirim sebuah kapal yang membawa makanan dan perbekalan darurat sebanyak 2.200 ton ke kota dan

pelabuhan terbesar Myanmar di yangoon untuk Muslim Rohingya di Myanmar.

Adapun berkenaan dengan adanya pengungsi Rohingya akibat dari adanya krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya, artikel yang berjudul *The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”: The Role of Malaysia, its Neighbors and ASEAN* menemukan bahwa Malaysia awalnya menolak untuk mengurus pengungsi dari Rohingya dengan alasan keamanan meskipun akhirnya menerima pengungsi Rohingya (Khairi, 2016). Diterimanya pengungsi Rohingya tersebut setelah didesak oleh organisasi internasional seperti PBB dan *Human Right Watch* (HRW) dan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Indonesia dan Thailand yang menghasilkan komitmen bahwa Malaysia dan Indonesia akan menerima pengungsi Rohingya meskipun Thailand tetap tidak menerima pengungsi etnis Rohingya. Malaysia dan Indonesia sepakat membantu membawa kapal-kapal pengungsi Rohingya ke darat dan tidak mendorong kembali manusia perahu etnis Rohingya ke laut serta menempatkan mereka ke tempat penampungan sementara (Khairi, 2016). Sedangkan artikel yang berjudul *From Myanmar to Malaysia: Protracted Refugee Situations of Rohingya People* mengkaji situasi pengungsi Rohingya ketika berada di Malaysia untuk bertahan hidup yang mana meskipun pengungsi Rohingya tersebut berhasil mencapai Malaysia, masalah lainnya muncul yaitu pemerintah Malaysia tidak mengakui status mereka sebagai pengungsi (Khairi, Askandar, & Wahab, 2018).

1.6. Kebaruan Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dan memuaskan, sebuah penelitian harus memiliki ciri khas dan kebaruan tersendiri yang didapatkan dari hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan atau ciri khas tesis yang akan penulis buat ini adalah penulis berusaha membandingkan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya. Sehingga, dengan membandingkan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, kita dapat menarik kesimpulan tentang diplomasi kemanusiaan dari negara mana yang lebih efektif untuk menangani krisis kemanusiaan Rohingya.

1.7. Kerangka Pemikiran

1.7.1. Konsep Soft Power & Konsep Diplomasi Kemanusiaan

Dalam membandingkan diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Malaysia terkait krisis kemanusiaan etnis Rohingya ini, penulis menggunakan konsep *soft power* dan konsep Diplomasi Kemanusiaan. Power (kekuatan) menurut Joseph S. Nye Junior ada dua bentuk, bentuk yang pertama adalah *hard power* yaitu pendayagunaan kekuatan baik dengan pola pendekatan *coercive* (memaksa) dan *reward* (pemberian hadiah). Adapun bentuk yang kedua adalah *Soft Power*. Pendekatan *Soft Power* tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan *hard power* yang berkarakter transaksional. Hal ini karena pendekatan *soft power* lebih berkarakter inspirasional yaitu kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya

tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh. (Saputra, 2017)

Adapun diplomasi kemanusiaan menurut literatur yang pernah ditulis oleh Marion Harroff-Tavel ” *The Humanitarian Diplomacy of the International Committee Of The Red Cross*“ adalah strategi dalam mempengaruhi para pihak yang terlibat konflik, serta pihak lainnya seperti negara, non-negara dan komunitas masyarakat yang bertujuan mengatasi masalah kemanusiaan melalui jaringan kerjasama yang berkelanjutan (bilateral, multilateral, resmi maupun tidak resmi (Sylvia OP, 2016). Sedangkan prinsip fundamental dari diplomasi kemanusiaan itu sendiri ada 4 yaitu *humanity, impartiality, neutrality, dan independence* (Minear & Smith, 2017 dalam Kuncoro dkk, 2018). *Humanity* yaitu harus meringankan penderitaan kepada siapapun dan dimana pun terjadinya krisis kemanusiaan terutama meringankan penderitaan kepada kelompok yang paling rentan. Kemudian *impartiality* yaitu aksi diplomasi kemanusiaan dilakukan tanpa diskriminasi. Sedangkan *neutrality* adalah pegiat diplomasi dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan terutama dalam keadaan konflik tidak boleh memihak atau mendukung pihak manapun. Adapun yang dimaksud dengan *independence* yaitu tujuan dari diplomasi kemanusiaan itu sendiri harus memiliki tujuan mulia yaitu meringankan penderitaan orang lain dan harus bebas dari kepentingan militer, ekonomi dan politik.

1.7.2. Konsep Politik Luar Negeri

Konsep politik luar negeri adalah konsep dalam studi hubungan internasional yang menggambarkan aksi atau tindakan politik serta kebijakan suatu negara yang diambil ketika berhubungan dengan negara

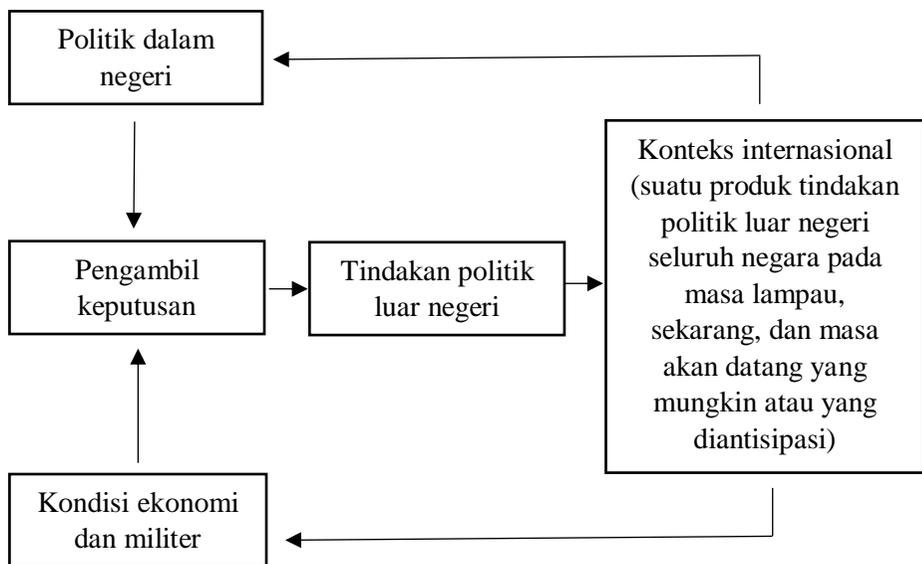
lain. Sehingga, politik luar negeri merupakan sarana untuk menjelaskan secara menyeluruh atau secara komprehensif dalam memahami tindakan Myanmar yang lebih menyambut baik diplomasi kemanusiaan Indonesia ketimbang diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Malaysia. Oleh karena itu, konsep kebijakan luar negeri dimasukkan sebagai kerangka pemikiran dalam pembuatan tesis ini.

Perlu kita ketahui bahwasanya pengertian dasar politik luar negeri adalah kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain dengan tujuan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu (Perwita & Yani, 2005). Namun demikian, meskipun politik luar negeri suatu negara mengatasnamakan negara, pada hakikatnya politik luar negeri tersebut dibuat oleh aktor atau kelompok yang bertindak atas nama negara dan bukan dibuat oleh negara itu sendiri. Dan kebijakan luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan di suatu negara untuk menghadapi negara lain atau unit internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam kepentingan nasional (Olton & Plano, 1999).

Sedangkan menurut William D. Coplin dalam membuat kebijakan politik luar negeri, para pembuat keputusan tidak bertindak tanpa pertimbangan atau dengan kata lain kebijakan politik luar negeri tersebut tidak dibuat secara asal-asalan. Namun, kebijakan politik luar negeri tersebut dibuat berdasarkan tiga hal yang mempengaruhi para pembuat kebijakan politik luar negeri yaitu kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta yang terakhir adalah konteks

internasional (Coplin & Marbun, 2003). Yang jika digambarkan maka hasilnya adalah seperti bagan 1.1 berikut :

Bagan 1.1 Gambar Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri



Sumber : William D. Coplin dan Mercedes Marbun “*Pengantar Politik Internasional*”, Bandung, 2003, hal.30

a. Kondisi politik dalam negeri. Menurut Coplin, salah satu variable penentu dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri adalah kondisi politik dalam negeri. Hal ini karena terdapat aktor-aktor politik dalam negeri yang dapat mempengaruhi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Adapun aktor-aktor tersebut menurut Coplin adalah birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan massa.

b. Kondisi politik dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Hal ini

karena kemampuan militer dan ekonomi dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi kemampuan *bargaining position* negara dalam pergaulan internasional. Dan besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Dengan demikian, ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kapabilitasnya.

c. Konteks internasional. Sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana suatu negara akan membuat sebuah kebijakan.

1.8. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, kemudian :

- a. Objek penelitian ini adalah diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Malaysia dalam krisis kemanusiaan Rohingya.
- b. Jangkauan Penelitiannya yaitu diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Malaysia dalam krisis kemanusiaan Rohingya dalam rentang waktu 2014 sampai 2020
- c. Sumber data terdiri dari data sekunder yaitu dari berbagai buku, jurnal, artikel, serta data-data kredibel yang diperoleh dari internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Dengan demikian, maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data dari buku, jurnal, berita online, dan sumber-sumber lainnya dari internet yang selanjutnya dianalisis.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, kontribusi riset, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teoritik, hipotesa, serta metodologi penelitian yang digunakan sebagai proposal atau langkah awal dari penelitian.

- Bab II. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dan Malaysia Di Berbagai Negara. Bab II ini berisi tentang diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia di berbagai negara.

- Bab III. Dinamika Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Dan Reaksi Dunia. Pada bab ini akan dibahas tentang akar masalah yang menyebabkan krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar beserta penderitaan-penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Selain itu, di bab ini juga dibahas reaksi dunia atas krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya.
- Bab IV. Membandingkan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Dan Malaysia Dalam Menghadapi Krisis Kemanusiaan Rohingya. Bab IV merupakan bab inti dari tesis ini. Di bab inilah akan diulas perbandingan diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi krisis kemanusiaan pada etnis Rohingya.
- Bab V. Kesimpulan. Berisi rangkuman atau ringkasan berdasarkan pada hasil yang didapatkan dari penelitian.